

Tranformasi PDI Perjuangan Dari Oposisi Ke Kekuasaan: Kepemimpinan Dan Strategi Dalam Sistem Multipartai Indonesia 1999- 2004

Danu Prasetyo ¹⁾; Endang Sulastri ²⁾

**^{1,2)}Study Program of Master of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Muhammadiyah Jakarta**

Email: ¹⁾ danu.prasetyo@student.umj.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [15 Maret 2026]

Revised [20 Juli 2026]

Accepted [25 Juli 2026]

KEYWORDS

*Transformasi Partai Politik,
PDI Perjuangan,
Kepemimpinan Megawati,
Oposisi, Koalisi,
Demokrasi Indonesia.*

***This is an open access
article under the [CC-BY-SA](#)
license***



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji proses transformasi politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dari partai oposisi menjadi partai penguasa pada periode 1999–2004. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara faktor internal meliputi ideologi Marhaenisme, kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, serta kelembagaan organisasi partai dan faktor eksternal berupa sistem multipartai terfragmentasi serta dinamika koalisi pascareformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi PDI Perjuangan merupakan proses multidimensi yang berlangsung secara dialektis: kemenangan elektoral 33,74% pada Pemilu 1999 tidak secara otomatis mengantarkan partai pada kekuasaan eksekutif akibat blokade politik Poros Tengah di MPR. Kegagalan tersebut justru menjadi katalis bagi penguatan kelembagaan internal melalui konsolidasi struktur hingga akar rumput, revitalisasi ideologi, dan pelebagaan kaderisasi melalui Sekolah Partai. Kepemimpinan Megawati berperan sebagai simpul pemersatu yang mengintegrasikan kapasitas ideologis, kelembagaan, dan strategi koalisi. Keberhasilan transformasi pada 2001 mencerminkan kemampuan partai menyeimbangkan keteguhan ideologis dengan kelenturan strategis dalam sistem multipartai yang belum terkonsolidasi.

ABSTRACT

This study examines the political transformation of the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI Perjuangan) from opposition to governing party during 1999–2004. Using a qualitative case study approach, this research explores the interaction between internal factors including Marhaenism ideology, Megawati Soekarnoputri's leadership, and party organizational institutionalization and external factors comprising fragmented multiparty system and post-reform coalition dynamics. The findings reveal that PDI Perjuangan's transformation was a multidimensional and dialectical process: the party's spectacular 33.74% electoral victory in the 1999 election did not automatically translate into executive power due to the political blockade by the Central Axis (Poros Tengah) coalition in the People's Consultative Assembly. This failure became a catalyst for strengthening internal institutionalization through grassroots consolidation, ideological revitalization, and systematic cadre development via the Party School. Megawati's leadership functioned as a unifying nexus integrating ideological, institutional, and coalition-building capacities. The successful transformation in 2001 reflects the party's ability to balance ideological steadfastness with strategic flexibility within an unconsolidated multiparty system.

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan institusi fundamental dalam demokrasi modern karena bertugas mengartikulasikan, mengagregasikan, dan menyalurkan kepentingan publik ke dalam proses pembuatan kebijakan (Almond & Powell, 1966). Literatur klasik menempatkan fungsi artikulasi dan agregasi sebagai mekanisme primer yang menjembatani hubungan antara masyarakat dan negara, sementara studi kontemporer menekankan peran partai sebagai institusi yang memproduksi representasi politik, mengorganisasi kompetisi elektoral, dan memelihara stabilitas demokrasi (Haris, 2005; Randall & Svasand, 2002). Kualitas partai politik dengan demikian menjadi determinan penting bagi kualitas demokrasi.

Reformasi 1998 membuka ruang institusional yang lebih luas bagi kompetisi politik di Indonesia. Rezim otoritarian yang selama tiga dekade membatasi kebebasan berpolitik digantikan oleh sistem multipartai terbuka. Dalam kerangka political opportunity structure (Tilly, 2003), perubahan tersebut menciptakan peluang bagi aktor politik untuk memobilisasi sumber daya, memperluas basis dukungan, dan memperkuat kelembagaan partai. Kondisi ini memungkinkan partai-partai yang sebelumnya terkooptasi negara untuk mendefinisikan ulang identitas dan strategi politiknya. Salah satu aktor kunci pada masa transisi ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), yang muncul dari konflik internal PDI dengan tokoh sentral Megawati Soekarnoputri.

Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli) menjadi titik balik bagi relasi antara negara, partai, dan masyarakat sipil. Intervensi negara terhadap PDI memicu resistensi dan memunculkan Megawati sebagai simbol perlawanan terhadap represi negara. Weber (1978) menyebut fenomena ini sebagai lahirnya karisma politik legitimasi yang bersumber dari persepsi masyarakat terhadap kualitas luar biasa seorang pemimpin. Modal karismatik ini bertransformasi menjadi kekuatan elektoral yang signifikan ketika ruang politik terbuka pascareformasi. Simbolisme dan identitas ideologis Sukarnoisme menjadi basis utama konsolidasi dukungan PDI Perjuangan (Muttaqin, 2018).

Kemenangan PDI Perjuangan dalam Pemilu 1999 dengan 33,74% suara merupakan hasil kombinasi antara modal karismatik, identitas ideologis, dan momentum politik pascareformasi. Namun kemenangan elektoral tersebut tidak serta-merta mengantarkan Megawati ke kursi presiden. Fragmentasi elite, dinamika koalisi, serta konfigurasi kekuatan politik di MPR 1999 menunjukkan bagaimana sistem politik Indonesia beroperasi melalui logika coalition-building dan kompromi elite (Ambardi, 2009). Poros Tengah yang terdiri dari partai-partai Islam berhasil menggagalkan pencalonan Megawati, merefleksikan karakter sistem kepartaian Indonesia yang oleh Sartori (2005) dikategorikan sebagai pluralisme moderat sistem yang ditandai oleh banyaknya partai tetapi tetap membutuhkan koalisi kompleks untuk menghasilkan pemerintahan.

Kegagalan memperoleh kekuasaan eksekutif pada 1999 justru mendorong PDI Perjuangan melakukan konsolidasi internal. Tomsa (2008) menunjukkan bahwa kemampuan partai mengelola transisi dari oposisi ke pemerintahan sangat bergantung pada kapasitas organisasi dan disiplin kader. Ketika Abdurrahman Wahid dilengserkan oleh MPR pada Sidang Istimewa 2001, PDI Perjuangan telah siap dengan kader-kader yang memiliki kapasitas dan loyalitas ideologis. Megawati kemudian naik menjadi presiden, menandai keberhasilan transformasi partai dari simbol perlawanan menjadi partai penguasa yang sah dalam sistem demokrasi.

Dalam perspektif akademik, sebagian besar literatur mengenai PDI Perjuangan masih bersifat parsial berfokus pada aspek elektoral, ideologi, atau kepemimpinan secara terpisah (Muttaqin, 2018; Tomsa, 2008; Wijayasari, 2012). Kristiyanto et al. (2023) secara eksplisit menyerukan perlunya penelitian yang mampu menjembatani analisis faktor internal (ideologi, kepemimpinan, kelembagaan) dan faktor eksternal (sistem multipartai, dinamika koalisi) untuk memahami secara komprehensif bagaimana partai membangun ketahanan dan kapasitas adaptasinya. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi research gap tersebut dengan menghadirkan analisis integratif.

LANDASAN TEORI

Teori Partai Politik: Fungsi, Organisasi, dan Institusionalisasi

Partai politik merupakan institusi yang lahir bersamaan dengan perkembangan demokrasi representatif modern (Sartori, 2020; Budiardjo, 2022). Dalam pengertian klasik, partai didefinisikan sebagai kelompok terorganisasi yang bertujuan memperoleh kekuasaan politik melalui cara-cara yang sah. Namun, perkembangan ilmu politik menunjukkan bahwa definisi tersebut belum cukup untuk menjelaskan kompleksitas peran partai dalam sistem politik modern. Miriam Budiardjo mengidentifikasi fungsi utama partai meliputi artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pembentukan pemerintahan.

Sartori menekankan bahwa partai politik tidak dapat dipahami secara terpisah dari sistem kepartaian. Partai harus dianalisis secara relasional bagaimana ia berfungsi dalam sistem bukan atomistik. Pendekatan ini menjadi dasar penting dalam studi partai kontemporer karena membuka perspektif tentang bagaimana kompetisi, koalisi, dan konflik antarpolisi membentuk dinamika sistem politik secara keseluruhan. Seiring waktu, partai mengalami transformasi dari partai kader elit menuju partai massa, dan selanjutnya menuju partai catch-all (Kirchheimer, 1966).

Institusionalisasi partai politik sebagaimana diuraikan oleh Randall dan Svasand (2002) ditandai oleh empat dimensi utama yang meliputi infused value berupa internalisasi nilai-nilai partai oleh anggota, systemness yang merujuk pada derajat keteraturan dan prediktabilitas organisasi, autonomy yang mencerminkan kemandirian dari tekanan eksternal, serta reification yang berkaitan dengan persepsi publik terhadap partai sebagai entitas yang mandiri dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, partai yang telah terinstitusionalisasi dengan baik cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap tekanan eksternal dibandingkan dengan partai yang memiliki kelembagaan lemah, sebagaimana dikemukakan oleh Panebianco (1988).

Teori Transformasi Partai Politik

Transformasi partai politik merujuk pada proses perubahan mendasar dalam orientasi, struktur, strategi, serta relasi kekuasaan partai dalam sistem politik (Panebianco, 1988). Berbeda dengan perubahan taktis jangka pendek, transformasi menandai pergeseran pola yang memengaruhi cara partai

memaknai dirinya, beroperasi secara organisatoris, dan berinteraksi dengan lingkungan politik. Kirchheimer (1966) merupakan pelopor dalam menjelaskan transformasi partai melalui konsep catch-all party: partai-partai massa ideologis bergeser menuju orientasi elektoral yang lebih pragmatis, ditandai oleh pelemahan ideologi, profesionalisasi organisasi, dan perluasan basis pemilih lintas kelas sosial. Panebianco (1988) menambahkan bahwa transformasi partai sangat dipengaruhi oleh genetic model asal-usul organisasi dan tingkat institusionalisasi. Partai yang lahir dari mobilisasi massa dengan kepemimpinan karismatik mengalami pola transformasi berbeda dibandingkan partai yang dibentuk oleh elite parlementer.

Harmel dan Janda (1994) mengembangkan model transformasi partai yang menekankan bahwa perubahan partai hampir selalu dipicu oleh kombinasi tekanan eksternal dan dinamika internal. Tekanan eksternal seperti kegagalan elektoral, perubahan sistem pemilu, atau ancaman dari pesaing dapat memaksa partai melakukan reformasi internal. Namun keberhasilan reformasi bergantung pada kesiapan dan kapasitas elite partai untuk merespons tekanan tersebut secara konstruktif.

Transformasi dari oposisi ke pemerintahan merupakan salah satu bentuk perubahan posisi partai yang paling signifikan. Secara teoretis, oposisi berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan dalam demokrasi. Namun ketika partai memasuki pemerintahan, ia menghadapi tuntutan baru yang berbeda: dari kritik menjadi pengelolaan kekuasaan, dari mobilisasi menjadi kebijakan, dari perlawanan simbolik menjadi tanggung jawab administratif. Sartori (2020) menegaskan bahwa dalam sistem multipartai, transisi ini jarang bersifat linear dan sering melibatkan kompromi politik yang kompleks.

Teori Kepemimpinan Politik: Karisma dan Transformasional

Weber (1978) memberikan kerangka fundamental untuk memahami kepemimpinan politik melalui konsep legitimasi. Ia membedakan tiga tipe otoritas: tradisional, legal-rasional, dan karismatik. Otoritas karismatik bersumber dari keyakinan kolektif terhadap kualitas luar biasa seorang pemimpin, dan sering muncul dalam periode krisis atau transisi ketika legitimasi institusi formal melemah. Tantangan utama kepemimpinan karismatik adalah proses routinization of charisma menginstitusionalisasikan otoritas karismatik ke dalam struktur organisasi agar dapat bertahan tanpa tergantung sepenuhnya pada individu pemimpin.

Burns (1978) serta Bass dan Riggio (2006) memperkenalkan konsep kepemimpinan transformasional sebagai proses di mana pemimpin dan pengikut saling mengangkat ke tingkat motivasi dan moralitas yang lebih tinggi melalui empat dimensi utama yang meliputi idealized influence di mana pemimpin menjadi model peran yang dikagumi, inspirational motivation dalam membangun visi yang inspiratif, intellectual stimulation guna mendorong pengikut berpikir inovatif, serta individualized consideration dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan setiap anggota secara spesifik. Dalam konteks partai politik, gaya kepemimpinan transformasional ini memegang peranan strategis, terutama saat menghadapi periode perubahan besar seperti transisi rezim atau upaya reformasi institusional yang mendalam.

Teori Sistem Multipartai dan Koalisi Politik

Sartori membedakan sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai relevan dan tingkat polarisasi ideologis. Dalam sistem multipartai moderat, perbedaan ideologis relatif terkendali sehingga memungkinkan koalisi stabil. Dalam konteks Indonesia pascareformasi, sistem multipartai yang sangat terfragmentasi dengan 48 partai peserta Pemilu 1999 menciptakan kondisi di mana kemenangan elektoral satu partai tidak secara otomatis menjamin penguasaan kekuasaan eksekutif.

Ambardi (2009) menunjukkan bahwa partai-partai di Indonesia cenderung beradaptasi dengan logika berbagi kekuasaan (power sharing) demi menjaga stabilitas politik dan akses terhadap sumber daya negara sebuah fenomena yang ia sebut sebagai 'politik kartel'. Dalam konteks ini, koalisi terbentuk bukan semata atas dasar kedekatan ideologis, melainkan kalkulasi kepentingan dan distribusi kekuasaan. Pemahaman tentang logika ini menjadi kunci untuk mengerti mengapa PDI Perjuangan meskipun pemenang Pemilu 1999, gagal memperoleh kursi presiden melalui mekanisme MPR.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis berbasis studi kasus tunggal (single case study). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena politik yang bersifat kompleks, kontekstual, dan tidak dapat direduksi menjadi variabel-variabel kuantitatif semata (Creswell, 2021; Yin, 2020). Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti mengeksplorasi suatu fenomena secara mendalam dalam konteks historis dan institusional tertentu, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak bersifat tegas (Yin, 2020).

Secara epistemologis, penelitian berpijak pada paradigma interpretatif yang memandang realitas politik sebagai hasil konstruksi sosial dan interaksi aktor dalam konteks historis tertentu (Schwartz-Shea & Yanow, 2012). Teori tidak diperlakukan sebagai hukum universal yang deterministik, melainkan sebagai alat analisis konseptual untuk membaca pola transformasi politik. Dengan demikian, analisis tidak berpretensi menghasilkan generalisasi kausal, tetapi bertujuan membangun pemahaman analitis yang kontekstual dan sistematis.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan narasumber utama Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M., selaku Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan periode 1999–2004, yang dilaksanakan pada 15 November 2025 di Kantor Balai Kota Jakarta selama kurang lebih tiga jam dan mencakup dua puluh pertanyaan dalam kluster tematik mengenai konteks historis dan posisi awal partai, proses transformasi politik, kepemimpinan Megawati, strategi dari oposisi menuju kekuasaan, serta refleksi dan warisan politik. Informasi tersebut didukung oleh data sekunder yang mencakup literatur akademik seperti buku, artikel jurnal bereputasi, disertasi, dan tesis, serta dokumen resmi partai mulai dari AD/ART, Piagam Perjuangan, Dasa Prasetya, hingga hasil kongres. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan dokumen negara dan arsip politik seperti undang-undang kepartaian, hasil KPU, risalah sidang MPR/DPR, serta arsip media massa nasional yang kredibel pada periode penelitian, di mana seluruh kombinasi data tersebut ditujukan untuk memperkuat analisis melalui mekanisme triangulasi sumber sebagaimana dikembangkan oleh Denzin (1978).

Teknik Analisis dan Keabsahan Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif-interpretatif melalui empat tahapan iteratif yang meliputi reduksi data berupa seleksi dan penyederhanaan data relevan, kategorisasi dan pengorganisasian data ke dalam tema-tema analitis utama sesuai kerangka konseptual, interpretasi teoretik melalui penafsiran data dengan landasan teori yang telah dibangun, serta penarikan kesimpulan analitis yang bersifat reflektif dan kritis sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014). Sejalan dengan proses tersebut, keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data wawancara dengan dokumen resmi partai dan arsip media, triangulasi teknik guna mengonfirmasi temuan wawancara melalui analisis dokumen, serta pemastian kredibilitas data melalui wawancara berulang untuk menjaga konsistensi informasi. Selain itu, aspek dependabilitas diupayakan melalui penyusunan prosedur penelitian yang terdokumentasi secara sistematis, sementara konfirmabilitas dilakukan dengan memisahkan secara jelas antara data empiris dan interpretasi peneliti sesuai dengan prinsip yang ditekankan oleh Lincoln dan Guba (1985) serta Creswell (2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Akar Historis PDI Perjuangan

Sejarah PDI Perjuangan tidak dapat dilepaskan dari dinamika panjang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang mengalami tekanan struktural sistematis pada masa Orde Baru. PDI merupakan hasil fusi partai-partai nasionalis dan Kristen pada 1973 berdasarkan kebijakan penyederhanaan partai yang dicanangkan rezim Soeharto. Sepanjang Orde Baru, PDI beroperasi dalam sistem politik yang sangat terbatas, di mana partai hanya berfungsi sebagai pelengkap legitimasi Golkar tanpa ruang gerak politik yang berarti. Konflik internal PDI yang memuncak pada peristiwa 27 Juli 1996 menjadi titik balik paling menentukan. Intervensi negara secara brutal terhadap kantor pusat PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta yang merenggut korban jiwa dan harta benda justru melahirkan simpati publik yang luar biasa kepada Megawati dan pendukungnya. Dalam kerangka teori political opportunity structure (Tilly, 2003), peristiwa ini membuka peluang politik dengan tiga mekanisme: meningkatnya simpati publik terhadap Megawati sebagai korban represi negara; menguatnya jaringan solidaritas di antara kelompok pro-demokrasi; dan melemahnya legitimasi rezim Orde Baru di mata internasional. Modal perlawanan ini kemudian terakumulasi menjadi fondasi utama ketika gerakan reformasi 1998 berhasil meruntuhkan kekuasaan Soeharto.

Pada 14 Februari 1999, Megawati secara resmi mendeklarasikan perubahan nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan sebuah langkah strategis yang memiliki dimensi simbolik dan politis sekaligus. Kata 'Perjuangan' tidak sekadar menunjukkan kontinuitas dari semangat perlawanan pasca-Kudatuli, tetapi juga menjadi deklarasi bahwa partai ini siap beroperasi sebagai kekuatan demokratis yang mandiri dalam sistem politik baru. PDI Perjuangan memosisikan diri sebagai partai nasionalis berbasis ideologi Marhaenisme, dengan Megawati sebagai figur sentral yang menyatukan identitas ideologis, simbolisme historis Bung Karno, dan aspirasi rakyat kecil.

Posisi PDI Perjuangan Pasca-Pemilu 1997: Boikot dan Aliansi Mega-Bintang

Pemilu 1997 menjadi ujian pertama bagi keteguhan politik Megawati dan loyalisnya. Pasca-Kudatuli, pemerintah mengesahkan kepengurusan PDI versi Soerjadi sebagai peserta resmi Pemilu 1997, sementara Megawati dan pendukungnya tidak diakui secara formal. Menghadapi situasi ini, Megawati mengambil sikap yang tegas dengan memboikot Pemilu 1997. Sikap ini bukan sekadar kampanye golput biasa, melainkan sebuah bentuk perlawanan yang mendelegitimasi keabsahan proses elektoral yang dianggap tidak demokratis.

Di tengah situasi represif tersebut, muncul fenomena politikal yang fenomenal: aliansi Mega-Bintang. Gerakan ini lahir dari pertemuan antara Megawati dengan Ketua DPC PPP Surakarta pada 1997 dan kemudian menyebar masif ke berbagai kota di Indonesia. Jargon 'Mega-Bintang' dimaknai sebagai ajakan kepada simpatisan Megawati untuk memberikan suara kepada PPP. Massa gabungan simpatisan PDI pro-Megawati dan PPP melakukan arak-arakan sambil mengibarkan bendera PPP bersama atribut merah PDI pro-Megawati. Di Surakarta, kampanye PPP dibanjiri sekitar 100.000 massa, menandakan untuk pertama kalinya mencairnya batas-batas ideologi kepartaian yang selama ini dirancang rezim Orde Baru. Fenomena ini menjadi isyarat terbentuknya poros kekuatan oposisi yang kelak menjadi fondasi lahirnya PDI Perjuangan (Wijayarsi, 2012).

Kemenangan Spektakuler Pemilu 1999

Pemilu 1999 berlangsung dalam konteks yang sama sekali berbeda: sistem politik yang lebih terbuka, pemilih yang bebas mengekspresikan aspirasi politiknya, dan 48 partai yang bersaing dalam kontestasi elektoral yang sangat kompetitif. Dalam lanskap politik yang cair dan belum terkonsolidasi ini, PDI Perjuangan muncul sebagai pemenang yang menonjol dengan meraih suara terbanyak secara nasional.

Tabel 1. Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu 1999

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase	Kursi DPR
1	PDI Perjuangan	35.689.073	33,74%	153
2	Partai Golkar	23.741.749	22,44%	120
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	13.336.982	12,61%	51
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	11.329.905	10,71%	58
5	Partai Amanat Nasional (PAN)	7.528.956	7,12%	34
6	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.049.708	1,94%	13
7	Partai Keadilan (PK)	1.436.565	1,36%	7
8	Partai-partai lainnya* (41 partai)	10.538.587	9,96%	64
	TOTAL	105.651.525	100%	500

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), 1999 (diolah)

Keberhasilan PDI Perjuangan meraih 35.689.073 suara (33,74%) dengan 153 kursi DPR tidak terlepas dari beberapa faktor yang saling memperkuat. Pertama, momentum historis: partai tampil sebagai simbol perlawanan autentik terhadap Orde Baru di tengah pemilih yang mendambakan perubahan nyata. Kedua, kepemimpinan simbolik Megawati: sebagai putri proklamator Bung Karno, figur Megawati membawa resonansi emosional mendalam yang melampaui kalkulasi rasional semata. Ketiga, jaringan organisasi yang mengakar: PDI Perjuangan mewarisi jaringan struktural dari PNI dan PDI yang sudah menjangkau hingga ke desa-desa, memungkinkan mobilisasi massa yang efektif. Keempat, identitas ideologis yang jelas: di tengah pragmatisme partai-partai baru, PDI Perjuangan tampil dengan platform yang konsisten membela kepentingan rakyat kecil.

Namun demikian, kemenangan elektoral yang gemilang ini tidak secara otomatis berbanding lurus dengan penguasaan kekuasaan eksekutif. Konfigurasi MPR yang terdiri dari 427 kursi partai politik, 35 kursi utusan daerah, dan 38 kursi TNI/Polri menciptakan dinamika yang kompleks. Meskipun menguasai 153 kursi (30,6%), PDI Perjuangan tetap memerlukan koalisi dengan partai lain untuk dapat memenuhi syarat mayoritas dalam pemilihan presiden. Situasi ini menunjukkan bahwa sistem politik Indonesia pascareformasi masih memerlukan negosiasi dan kompromi elite di luar mekanisme pemilihan langsung.

Dinamika Poros Tengah dan Paradoks Kemenangan

Terbentuknya Poros Tengah menjadi salah satu dinamika paling menentukan dalam perjalanan politik PDI Perjuangan pasca-Pemilu 1999. Koalisi partai-partai Islam PKB, PPP, PAN, PBB, dan PKS secara sistematis memblokir pencalonan Megawati sebagai presiden dalam Sidang Umum MPR.

Dalam perspektif teori koalisi minimal winning (Sartori, 1976), Poros Tengah merupakan koalisi yang dibangun bukan atas dasar kedekatan ideologis programatik, melainkan atas dasar kepentingan bersama memblokir lawan politik.

Sebagai hasil kompromi politik, Megawati ditetapkan sebagai Wakil Presiden mendampingi Abdurrahman Wahid yang terpilih sebagai presiden. Meskipun bukan posisi yang diharapkan, pengalaman di pemerintahan ini menjadi modal penting bagi PDI Perjuangan untuk memahami mekanisme kekuasaan dari dalam. Linz dan Stepan (1996) menilai bahwa keberhasilan aktor politik mengadaptasi mekanisme institusional baru merupakan prasyarat konsolidasi demokrasi. Dalam pengertian ini, 'kegagalan' PDI Perjuangan pada 1999 justru menjadi tahap pembelajaran yang esensial.

Konsolidasi Internal: Pilar-Pilar Transformasi dari Dalam Penguatan Ideologi Marhaenisme

Di tengah pragmatisme politik yang melanda banyak partai pascareformasi, PDI Perjuangan justru memperkuat fondasi ideologisnya. Marhaenisme yang diwarisi dari ajaran Bung Karno tentang nasionalisme kerakyatan, antiimperialisme, dan keadilan sosial tidak hanya ditempatkan sebagai doktrin abstrak, melainkan sebagai panduan konkret dalam merumuskan kebijakan dan strategi politik. Kristiyanto et al. (2023) mencatat bahwa penguatan ideologi ini diwujudkan dalam Piagam Perjuangan dan Dasa Prasetya, serta ditegaskan secara konsisten dalam setiap Kongres Partai.

Penguatan ideologi terbukti efektif dalam mempertahankan loyalitas basis tradisional PDI Perjuangan. Hasil survei nasional yang dilakukan Kristiyanto et al. (2023) menunjukkan bahwa dari 6,8% masyarakat yang merasa dekat dengan suatu partai, 33,1% di antaranya merasa dekat dengan PDI Perjuangan angka tertinggi di antara seluruh partai. Data ini membuktikan keberhasilan pelembagaan ideologi dalam membangun partisanship yang tidak semata bergantung pada siklus elektoral.

Kaderisasi dan Penguatan Struktur Organisasi

Salah satu faktor kunci yang memperkuat ketahanan PDI Perjuangan adalah investasi sistematis dalam kaderisasi dan penguatan jaringan organisasi hingga akar rumput. Berbeda dengan partai-partai baru yang cenderung elitis dan berbasis di perkotaan, PDI Perjuangan mewarisi dan terus mengembangkan jaringan struktural dari PNI dan PDI hingga ke desa-desa.

Salah satu instrumen kunci adalah pendirian dan pengaktifan Sekolah Partai. Dalam Pasal 85 AD/ART PDI Perjuangan, Sekolah Partai dibedakan dalam tiga gelombang: pertama untuk kader internal partai, kedua untuk anggota dan mereka yang diusung partai, dan ketiga untuk campuran kader partai lain yang mendapat dukungan. Kristiyanto et al. (2023) menegaskan bahwa mekanisme ini dirancang untuk mengeliminasi pengaruh politik figur dan patronase semata, menggantinya dengan peningkatan kualitas kader yang memiliki komitmen ideologis.

Dr. Pramono Anung menjelaskan filosofi Sekolah Partai: *"Sekolah Partai itu adalah 'dapur' PDIP. Di sana kami tidak hanya mengajarkan teknis berpolitik, tapi yang utama adalah karakter dan ideologi. Sebelum nyaleg, sebelum jadi bupati atau gubernur, mereka harus 'digenjot' dulu di sekolah partai. Mereka harus paham sejarah perjuangan bangsa, paham ajaran Bung Karno, dan paham bahwa mereka bukan wakil pribadi, tapi wakil partai yang punya tanggung jawab moral kepada rakyat."*

Pelembagaan Partai: Empat Dimensi Institusionalisasi

Ketahanan PDI Perjuangan dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks pascareformasi dapat dipahami melalui kerangka institusionalisasi yang dikembangkan Huntington (1968) dan Randall & Svasand (2002). Keempat dimensi institusionalisasi adaptabilitas, kompleksitas, koherensi, dan otonomi termanifestasi secara konkret dalam praktik politik partai pada periode 1999–2004.

Tabel 2. Dimensi Institusionalisasi PDI Perjuangan 1999–2004

Dimensi Institusionalisasi	Indikator (Huntington, 1968; Randall & Svasand, 2002)	Manifestasi pada PDI Perjuangan 1999–2004
Adaptabilitas	Kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan	Respons terhadap blokade Poros Tengah → konsolidasi internal; respons terhadap kekalahan 2004 → penguatan kaderisasi → pemenang 2014 dan 2019
Kompleksitas	Diferensiasi struktur dan fungsi organisasi	Struktur berjenjang DPP–DPD–DPC–PAC–Ranting–Anak Ranting; Sekolah Partai sebagai instrumen pendidikan politik

Koherensi	Kesatuan internal dan loyalitas kader	Ideologi Marhaenisme sebagai perekat; survei menunjukkan PDI Perjuangan memiliki party ID tertinggi (33,1% dari pemilih yang merasa dekat partai)
Otonomi	Kemandirian dari tekanan eksternal	Mekanisme rekrutmen berbasis ideologi, bukan sekadar popularitas; menolak kooptasi figur tanpa komitmen ideologis

Sumber: Diadaptasi Dari Huntington (1968), Randall & Svasand (2002), Dan Kristiyanto Et Al. (2023) (Diolah).

Data di atas menunjukkan bahwa keempat dimensi institusionalisasi berfungsi secara sinergis dalam membangun ketahanan partai. Kemampuan adaptasi memastikan partai tidak terjebak pada strategi masa lalu; kompleksitas organisasi menjamin efektivitas implementasi kebijakan; koherensi ideologis memperkuat loyalitas kader; dan otonomi dari tekanan eksternal memastikan kedaulatan partai tetap terjaga.

Kepemimpinan Megawati: Karisma, Legitimasi, dan Fungsi Pemersatu

Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri merupakan variabel yang tidak dapat dipisahkan dari narasi transformasi PDI Perjuangan. Dalam perspektif Weber (1978), kepemimpinan Megawati merupakan perpaduan unik antara otoritas karismatik yang bersumber dari warisan historis Bung Karno dan legitimasi moral sebagai korban rezim Orde Baru dengan otoritas legal-rasional yang diperoleh melalui posisi formal sebagai Ketua Umum partai dan kemudian sebagai Wakil Presiden dan Presiden.

Dalam dimensi kepemimpinan transformasional (Burns, 1978; Bass & Riggio, 2006), Megawati menjalankan fungsi pemimpin tidak hanya melalui penguatan simbolik semata, tetapi juga melalui pembangunan kapasitas kelembagaan secara sistematis. Hasil survei nasional Kristiyanto et al. (2023) menunjukkan bahwa kepemimpinan Megawati dipersepsikan unggul dalam menjaga konsistensi aturan partai, meningkatkan kapasitas kader, dan menerjemahkan ideologi ke dalam program kebijakan konkret.

Kepemimpinan Megawati juga berhasil mengelola resistensi internal arus idealis yang menolak setiap bentuk kompromi dengan kekuatan yang sebelumnya berseberangan. Dr. Pramono Anung menggambarkan bahwa Megawati tidak pernah memarahi atau mengintimidasi mereka yang berbeda pendapat, tetapi mendengarkan dan menjelaskan dengan cara yang tenang dan berwibawa. Pola manajemen konflik ini mencerminkan apa yang disebut Panebianco (1988) sebagai 'selective incentives' kemampuan pemimpin memberikan reward simbolik dan material sesuai kontribusi, sehingga menjaga keseimbangan dalam distribusi kekuasaan internal.

Weber (1978) menegaskan bahwa tantangan utama kepemimpinan karismatik adalah proses routinization of charisma menginstitusionalisasikan otoritas personal ke dalam struktur organisasi. PDI Perjuangan menempuh jalan ini melalui Sekolah Partai sebagai mekanisme transmisi nilai dan kepemimpinan lintas generasi. Instrumen ini memastikan bahwa karisma Megawati tidak sekadar menjadi modal personal, melainkan terinstitusionalisasi dalam norma, prosedur, dan kultur organisasi partai.

Strategi Koalisi dan Adaptasi terhadap Sistem multipartai

Salah satu dimensi terpenting dalam transformasi PDI Perjuangan adalah kemampuannya mengembangkan kapasitas koalisi yang lebih matang setelah kegagalan pada Sidang Umum MPR 1999. Partai yang semula sangat ideologis dan cenderung non-kompromistis saat menjadi oposisi, perlahan-lahan mengembangkan kelenturan strategis dalam berkoalisi tanpa kehilangan identitas.

Adaptasi strategis ini termanifestasi konkret dalam pembentukan Kabinet Gotong Royong (2001–2004) yang inklusif, melibatkan berbagai kekuatan politik sebagai upaya menjaga stabilitas pemerintahan di tengah fragmentasi politik. Strategi ini sejalan dengan pandangan Panebianco (1988) dan Mietzner (2013) bahwa dalam sistem multipartai yang belum terkonsolidasi, kabinet sering kali menjadi arena negosiasi kepentingan elite sekaligus instrumen mempertahankan legitimasi. Kabinet Gotong Royong mencerminkan keseimbangan antara distribusi kekuasaan kepada mitra koalisi dan pengisian posisi kunci dengan kader berkomitmen ideologis.

Pengelolaan hubungan pusat-daerah juga menjadi pilar penting dalam strategi koalisi. PDI Perjuangan memastikan bahwa kebijakan dan strategi partai di tingkat nasional dapat diimplementasikan secara efektif di daerah, sekaligus menjadi saluran aspirasi dari daerah ke pusat. Temuan Wijayarsi (2012) di Kota Tegal dan Rochmawati (2020) di Kabupaten Karanganyar memperkuat gambaran ini konsolidasi hingga tingkat ranting dan anak ranting, serta konsolidasi eksternal dengan tokoh masyarakat, menjadi kunci kemenangan di tingkat lokal.

Analisis Multidimensi Transformasi PDI Perjuangan 1999–2004
Tabel 3. Matriks Analisis Transformasi PDI Perjuangan 1999–2004

Dimensi Transformasi	Kondisi/Tantangan	Respons Strategis	Hasil/Dampak
Dimensi Ideologis	Marhaenisme & Sukarnoisme	Tetap konsisten meski ada tekanan pragmatisme	Menjaga kohesi internal dan basis massa tradisional nasionalis
Dimensi Kepemimpinan	Otoritas karismatik + legal-rasional Megawati	Sentralisasi dengan tetap memberi ruang inisiatif lokal	Stabilitas organisasi di tengah fragmentasi elite
Dimensi Kelembagaan	Konsolidasi DPC/DPD, Sekolah Partai, kaderisasi	Penguatan akar rumput hingga tingkat RT	Loyalitas kader, daya tahan terhadap tekanan eksternal
Dimensi Koalisi	Poros Tengah memblokir Pemilu 1999	Adaptasi strategis, negosiasi elite, Kabinet Gotong Royong	Akses kekuasaan eksekutif pada 2001

Sumber: Diolah dari hasil penelitian (2025)

Tabel matriks di atas merangkum secara komprehensif empat dimensi transformasi yang saling berinteraksi dalam proses perjalanan PDI Perjuangan. Dimensi ideologis menunjukkan bagaimana Marhaenisme berfungsi bukan hanya sebagai identitas, tetapi sebagai mekanisme pertahanan terhadap godaan pragmatisme berlebihan. Dimensi kepemimpinan menunjukkan bagaimana sentralisasi di bawah Megawati yang oleh sebagian kalangan dipandang sebagai kelemahan justru berfungsi sebagai mekanisme stabilisasi yang kritis pada masa transisi. Dimensi kelembagaan menunjukkan bagaimana investasi jangka panjang pada kaderisasi menghasilkan ketahanan organisasional yang melampaui siklus elektoral tunggal. Dimensi koalisi menunjukkan bagaimana 'kegagalan' pada 1999 menjadi pembelajaran berharga yang memungkinkan adaptasi strategis pada periode berikutnya.

Perbandingan Elektoral dan Proses Pembelajaran Institucional

Tabel 4. Perbandingan Perolehan Suara PDI Perjuangan Pemilu 1999 dan 2004

Tahun	Perolehan Suara	Persentase	Kursi DPR	Perubahan Suara	Perubahan Kursi
1999	35.689.073	33,74%	153	—	—
2004	21.026.629	18,53%	109	-14.662.444 (-15,21%)	-44 kursi

Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU), 1999 dan 2004 (diolah)

Data perbandingan elektoral menunjukkan bahwa PDI Perjuangan mengalami kemerosotan signifikan pada Pemilu 2004 kehilangan 15,21% suara dan 44 kursi DPR. Penurunan ini dapat dipahami melalui beberapa faktor: (1) kegagalan memenuhi ekspektasi publik yang sangat tinggi pascakemenangan 1999; (2) fragmentasi dukungan akibat munculnya Partai Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono; dan (3) tekanan pemilih untuk mencoba alternatif baru dalam sistem demokrasi yang semakin terbuka.

Namun, dari perspektif institusionalisasi, kemerosotan ini justru memicu babak baru penguatan internal. Kristiyanto et al. (2023) mencatat bahwa PDI Perjuangan merespons dengan memperkuat pelemagaan ideologis dan kaderisasi bukan dengan mengabaikan identitas untuk mengejar pragmatisme semata. Strategi ini terbukti tepat: PDI Perjuangan berhasil kembali sebagai pemenang Pemilu 2014 dan 2019, membuktikan ketahanan institusional yang dibangun pada periode 1999–2004 berfungsi sebagai fondasi yang kokoh untuk keberlanjutan jangka panjang.

Integrasi Keteguhan Ideologis dan Kelenturan Strategis

Berdasarkan analisis multidimensional di atas, keberhasilan transformasi PDI Perjuangan dari oposisi menjadi partai penguasa pada 1999–2004 dapat disintesis sebagai kemampuan mengintegrasikan dua hal yang tampak kontradiktif namun sesungguhnya saling melengkapi: keteguhan ideologis dan kelenturan strategis. Keteguhan ideologis diwujudkan dalam konsistensi mempertahankan identitas sebagai partai nasionalis-kerakyatan berbasis Marhaenisme sebagai sumber legitimasi dan perekat internal. Kelenturan strategis diwujudkan dalam kemampuan beradaptasi dengan sistem multipartai melalui negosiasi koalisi dan pengelolaan hubungan elite.

Dr. Pramono Anung merangkum sintesis ini dengan sangat tepat: *"Resep PDIP itu sederhana: ideologi yang kokoh sebagai kompas, kepemimpinan yang kuat sebagai nahkoda, dan mesin partai yang bekerja keras sebagai pendayung. Tiga hal ini harus berjalan beriringan. Kalau hanya ideologi kuat tapi tidak adaptif, kita akan jadi partai museum. Kalau hanya pragmatis tapi tanpa ideologi, kita akan jadi partai pengekor yang mudah bubar. Ibu Mega mengajarkan kami untuk tetap berprinsip, tapi tidak kaku; untuk kompromi dalam taktik, tapi tidak dalam prinsip. Itulah transformasi sejati."*

Sintesis ini menegaskan bahwa transformasi PDI Perjuangan bukan tentang pengabaian ideologi demi kekuasaan, melainkan tentang bagaimana partai menjadikan ideologi sebagai landasan untuk merumuskan strategi-strategi adaptif yang relevan dengan konteks zaman. Proses ini memperkuat ketahanan (resilience) partai dan menjadikannya salah satu institusi politik paling stabil dan berpengaruh dalam demokrasi elektoral Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama:

1. Proses transformasi politik PDI Perjuangan berlangsung secara bertahap, multidimensi, dan dialektis. Dimulai dari akumulasi modal politik sebagai simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru, kemenangan elektoral spektakuler dalam Pemilu 1999, konsolidasi internal pascakegagalan mengakses kekuasaan eksekutif akibat blokade Poros Tengah, hingga berhasil memasuki pemerintahan pada 2001 melalui mekanisme konstitusional. Tekanan eksternal alih-alih melemahkan justru berfungsi sebagai katalis bagi penguatan kelembagaan internal melalui konsolidasi struktural hingga akar rumput, revitalisasi ideologi Marhaenisme, dan pelembagaan kaderisasi sistematis melalui Sekolah Partai. Transformasi ini mencerminkan pola dialektika antara tekanan eksternal dan respons internal yang produktif.
2. Keberhasilan transformasi ditentukan oleh interaksi sinergis antara tiga faktor internal yang saling memperkuat: (a) ideologi Marhaenisme yang berfungsi sebagai fondasi identitas, kompas strategis, dan mekanisme pertahanan terhadap godaan pragmatisme berlebihan; (b) kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang merupakan perpaduan otoritas karismatik dan legal-rasional, berfungsi sebagai simpul pemersatu yang mengintegrasikan kepentingan internal yang beragam, menerjemahkan ideologi ke dalam strategi politik, dan menjaga stabilitas organisasi di tengah dinamika elite yang cair; serta (c) penguatan kelembagaan partai melalui penataan struktur organisasi yang berjenjang, mekanisme rekrutmen berbasis ideologi, dan jaringan kader yang solid hingga tingkat desa. Ketiga faktor ini bekerja secara simultan dan saling memperkuat, menciptakan fondasi kokoh bagi ketahanan partai dalam sistem multipartai yang kompetitif.
3. Faktor eksternal berupa sistem multipartai yang terfragmentasi dan dinamika koalisi elite pascareformasi turut membentuk pola transformasi PDI Perjuangan secara signifikan. Partai berhasil menunjukkan kemampuan menyeimbangkan antara keteguhan prinsip ideologis dan kelenturan taktis dalam merespons tekanan eksternal sebagaimana tercermin dalam strategi membangun komunikasi lintas kekuatan politik, pengelolaan koalisi pemerintahan yang inklusif melalui Kabinet Gotong Royong, dan pengendalian praktik patronase agar tidak menggerogoti kedaulatan dan identitas partai. Transformasi PDI Perjuangan pada 1999–2004 dengan demikian merupakan sebuah proses pendewasaan institusional yang mengintegrasikan keteguhan ideologis, kepemimpinan resilien, kelembagaan yang kokoh, dan adaptasi strategis terhadap dinamika eksternal yang pada akhirnya memperkuat kualitas demokrasi Indonesia melalui hadirnya partai politik yang stabil dan berakar kuat di masyarakat.

Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian, terdapat empat rekomendasi yang dapat diajukan:

1. Bagi pengembangan kajian ilmu politik, penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif antara PDI Perjuangan dengan partai-partai lain yang mengalami transformasi serupa di Indonesia maupun di negara-negara demokrasi transisional Asia Tenggara. Pendekatan komparatif akan memperkaya pemahaman teoretis mengenai pola-pola transformasi partai serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam berbagai konteks sistem politik.
2. Bagi partai politik di Indonesia, pengalaman PDI Perjuangan menunjukkan bahwa fondasi ideologis yang jelas dan sistem kaderisasi yang terstruktur merupakan investasi jangka panjang yang menentukan ketahanan organisasional. Partai-partai politik hendaknya tidak hanya berorientasi pada kemenangan elektoral jangka pendek, tetapi membangun institusi yang kuat dengan kader-kader yang memahami dan menghayati nilai-nilai perjuangan partai.
3. Bagi penguatan demokrasi Indonesia, pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu perlu mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi penguatan kelembagaan partai, misalnya melalui regulasi yang mendukung kaderisasi berkelanjutan dan memberikan insentif bagi partai yang konsisten menjalankan pendidikan politik. Demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud jika partai politik berfungsi bukan sekadar mesin pemenangan pemilu, tetapi juga sebagai sekolah kader dan penyalur aspirasi rakyat yang efektif.
4. Bagi penelitian lanjutan, penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus temporal 1999–2004 dan keterbatasan narasumber primer. Penelitian lanjutan dapat memperluas rentang waktu analisis untuk melihat keberlanjutan transformasi PDI Perjuangan pasca-2004 hingga era kontemporer, serta menambah jumlah narasumber dari berbagai latar belakang baik kader akar rumput, akademisi, maupun analis politik untuk memperkaya kedalaman analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1966). *Comparative Politics: A Developmental Approach*. Boston: Little, Brown and Company.
- Ambardi, K. (2009). *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational Leadership* (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Bhakti, I. N. (2003). The Transition to Democracy in Indonesia: Some Outstanding Problems. In J. Rolfe (Ed.), *The Asia-Pacific: A Region in Transition*. Honolulu: Asia-Pacific Center for Security Studies.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. London: Sage.
- Budiardjo, M. (2022). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. New York: Harper & Row.
- Creswell, J. W. (2021). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.
- Fossati, D. (2019). The Resurgence of Ideology in Indonesia: Political Islam, Aliran and Electoral Dynamics. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 119–148.

- Hadiz, V. R. (2004). Reorganising Political Power in Indonesia: A Reconsideration of So-Called Democratic Transitions. *Pacific Review*, 17(4), 591–611.
- Harmel, R., & Janda, K. (1994). An Integrated Theory of Party Goals and Party Change. *Journal of Theoretical Politics*, 6(3), 259–287.
- Haris, S. (2005). *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*. Jakarta: Gramedia.
- Heywood, A. (2017). *Political Ideologies: An Introduction* (6th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. New Haven: Yale University Press.
- Kirchheimer, O. (1966). The Transformation of the Western European Party Systems. In J. LaPalombara & M. Weiner (Eds.), *Political Parties and Political Development* (pp. 177–200). Princeton: Princeton University Press.
- Kristiyanto, H., Arinanto, S., & Ghafur, H. S. (2023). Institutionalization and Party Resilience in Indonesian Electoral Democracy. *Heliyon*, 9, e22919. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22919>
- Lay, C. (2011). *State, Society, and Political Conflict in Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, CA: Sage.
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Mietzner, M. (2013). *Money, Power, and Ideology: Political Parties in Post-Authoritarian Indonesia*. Singapore: NUS Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Muttaqin, A. (2018). Ideologi Marhaenisme dan Politik Identitas PDI Perjuangan. *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 3(1), 45–62.
- Panebianco, A. (1988). *Political Parties: Organization and Power*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pompe, S. (1999). Partai Demokrasi Indonesia (PDI). In *De Indonesische Algemene Verkiezingen 1999* (pp. 143–145). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004643031_036
- Prasetyo, A. (2023). Kepemimpinan Megawati dalam Krisis Nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 45–56.
- Randall, V., & Svasand, L. (2002). Party Institutionalization in New Democracies. *Party Politics*, 8(1), 5–29.
- Ridwan, M. A., & Fatkhuri. (2022). Rekrutmen Politik dan Demokrasi Internal Partai: Studi pada PDI Perjuangan. *Jurnal Politik Walisongo*, 5(1), 89–103.
- Rochmawati, Y. B. (2020). *Perkembangan Politik PDI Perjuangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 1999–2004*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Romli, L. (2016). *Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sartori, G. (2020). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Colchester: ECPR Press. (Original work published 1976).
- Schwartz-Shea, P., & Yanow, D. (2012). *Interpretive Research Design: Concepts and Processes*. New York: Routledge.

- Sulaiman, A. (2022). *Dinamika Politik Transisi di Indonesia: Megawati dan Politik Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tilly, C. (2003). *The Politics of Collective Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tomsa, D. (2008). *Party Politics and Democratization in Indonesia: Golkar in the Post-Suharto Era*. London: Routledge.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). Berkeley: University of California Press.
- Wijayasari, E. (2012). Strategi PDI-P dalam Memenangkan Pemilu 1999 di Kota Tegal. *Journal of Indonesian History*, 1(2), 140–147.
- Yin, R. K. (2020). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.